

Mengukur kinerja apbd kota surabaya analisis value for money

Tito Aditya Perdana¹, Risanda A. Budiantoro², Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

¹Email: titoadityap92@gmail.com

²Email: risandabudiantoro@gmail.com

³Email: febrianur3@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis value for money dengan indikator rasio ekonomi, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen alokasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Surabaya selama 2014-2018. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) ketiga rasio yang diujikan menunjukkan performa yang baik.; (2) perhitungan rasio ekonomis menunjukkan performa keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya pada kategori ekonomis, dimana hasilnya konsisten dan cenderung mengalami peningkatan pada rentang 80,71 persen –88,21 persen; (3) perhitungan rasio efisiensi menunjukkan performa keuangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori sangat efisien, yang dibuktikan dengan rentang penilaian 110,24 persen –119,19 persen; (4) perhitungan rasio efektivitas menunjukkan performa keuangan Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang dibuktikan dengan rentang penilaian 89,82 persen hingga 103,51 persen

Kata Kunci: Kinerja anggaran; alokasi pendapatan; belanja daerah; *analisis value for money*

Measuring the performance of APBD in the city of Surabaya, analysis of value for money

Abstract

This research aimed to see the financial performance of Surabaya City's Government on revenue and expenditure. The methodology of this research uses value for money analysis with indicators of economics ratios, effectiveness ratios and efficiency ratios. Secondary data used in the form of fiscal budget allocation and realization of Surabaya City Government Report in the year 2014-2018. The result showed that (1) Three component calculations of financial performance of Surabaya City's government on revenue and expenditure based on value for money analysis show good results; (2) On economic ratios calculation, financial performance shows the economics level, these result were consistent and tend to increase in a range of 80.71 percent - 88.21percent; (3) On efficiency ratio, financial performance shows very efficient level in a range of 110.24 percent to 119.19 percent; (4) On effectiveness ratio, financial performance shows on level of effective to very effective in a range of 89.82 percent to 103.51 percent..

Keywords: *Financial performance; revenue and expenditure budget; value for money analysis*

PENDAHULUAN

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan konsekuensi yang logis berupa pentingnya pengelolaan keuangan yang seefektif dan seefisien mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (Susetyo, 2008). Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan, dimana salah satunya dapat menggunakan analisis *value for money*. Pengukuran kinerja ini memiliki dua manfaat, antara lain (Jumingan, 2006): (1) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan; dan (2) mengetahui dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan tujuan dalam pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi salah satu kajian yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Secara konsep, perhitungan *value for money* yang menekankan pada prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif), dimana konsep ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Hal ini dibenarkan oleh Mardiasmo, (2009), dimana *value for money* ini merupakan suatu prinsip yang penting dari pengelolaan anggaran kinerja suatu pemerintahan dengan dasar ekonomis (melalui meminimalisir input dengan menghindari pengeluaran yang boros); efisien (pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau output tertentu dengan input yang terendah) dan efektif (pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan). Dimana ketiga hal pokok tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dijabarkan secara parsial.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintah daerah yang juga menyelenggarakan otonomi daerah tersebut. Dalam mengelola anggarannya Pemerintah Kota Surabaya selalu memperhatikan tentang keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran. Berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama rentang periode penelitian, bahkan nilainya tertinggi se-kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur.

Namun, keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Surabaya ini belum tentu menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya sudah sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *value for money*. Sehingga, atas kondisi ini maka perlu dilakukannya suatu pengukuran atas pencapaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja dari Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan analisis *value for money*. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan dasar dan penilaian dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pengelola anggaran pendapatan dan belanjanya secara lebih ekonomi, efektif dan efisien.

METODE

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Hal yang menjadi penekanan yaitu melakukan pengukuran kinerja dari Pemerintah Kota Surabaya analisis *value for money* yang ditentukan dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggarannya. Data yang diolah merupakan data sekunder yang bersumber pada Laporan Realisasi Anggaran selama rentang periode penelitian.

Perhitungan *value for money*

Secara teknik perhitungan *value for money* yang digunakan dalam penelitian ini mengandung tiga aspek pengukuran yaitu dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dimana masing-masing elemen yang digunakan tersebut saling berhubungan, yaitu (Mardiasmo, 2009):

Pengukuran kinerja dari segi ekonomis

Untuk mengetahui kinerja dari segi ekonomis ini, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (Purwiyanti, 2017):

$$\begin{aligned} \text{rasio ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Harga input}} \times 100\% \dots\dots\dots 1 \\ \text{rasio ekonomis} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \dots\dots\dots 2 \end{aligned}$$

Tabel 1. Kriteria perhitungan kinerja keuangan atas dasar ekonomis

Persentase kinerja	Kriteria
>100 persen	Tidak ekonomis
100 persen	Berimbang
<100 persen	Ekonomis

Pengukuran kinerja dari segi efisiensi

Untuk mengetahui kinerja dari segi efisiensi ini, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (Purwiyanti, 2017):

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\% \dots\dots\dots 3$$

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots 4$$

Tabel 2. Kriteria perhitungan kinerja keuangan atas dasar efisiensi

Persentase kinerja	Kriteria
>100 persen	Sangat efisien
90 persen – 100 persen	Efisien
80 persen – 90 persen	Cukup efisien
60 persen – 80 persen	Kurang efisien
<60 persen	Tidak efisien

Pengukuran kinerja dari segi efektivitas

Untuk mengetahui kinerja dari segi efektivitas ini, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (Purwiyanti, 2017):

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \dots\dots\dots 5$$

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots 6$$

Tabel 3. Kriteria perhitungan kinerja keuangan atas dasar efektivitas

Persentase kinerja	Kriteria
>100 persen	Sangat efektif
90 persen – 100 persen	Efektif
80 persen – 90 persen	Cukup efektif
60 persen – 80persen	Kurang eketif
<60 persen	Tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan antara pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan defisit anggaran selama rentang periode penelitian. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, defisit APBD ini terjadi apabila jumlah pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanjanya. Sehingga apabila APBD mengalami defisit, Pemerintah Kota Surabaya akan membiayainya dengan penerimaan pembiayaan termasuk didalamnya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Karena ketika terjadi defisit dalam APBD, tidak terdapat pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN untuk menutup defisit tersebut. Hasil dari

perhitungan *value for money* dari ketiga rasio baik ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas kinerja Pemerintah Kota Surabaya, ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 4. Rasio kinerja keuangan pemerintah kota surabaya, T.A 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio ekonomis	80.71% (Ekonomis)	81.90% (Ekonomis)	88.13% (Ekonomis)	88.35% (Ekonomis)	88.21% (Ekonomis)
Rasio efisiensi	118.43% (Sangat efisien)	119.19% (Sangat efisien)	118.48% (Sangat efisien)	110.24% (Sangat efisien)	112.01% (Sangat efisien)
Rasio efektivitas	98.98% (Efektif)	102.39% (Sangat efektif)	89.82% (Efektif)	103.51% (Sangat efektif)	101.49% (Sangat efektif)

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio ekonomi menunjukkan hasil yang konsisten dengan kriteria ekonomis selama rentang periode penelitian. Untuk rasio efisiensinya menunjukkan selama rentang periode penelitian, kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengalokasikan *input*-nya untuk *output*-nya memperoleh hasil yang sangat efisien. Sedangkan untuk rasio efektivitasnya, selama rentan periode penelitian mengalami fluktuatif namun masih dalam jangkauan yang baik yaitu efektif hingga sangat efektif.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menekankan pentingnya pajak daerah sebagai salah satu instrumen sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri setelah diperlakukannya otonomi daerah dengan landasan UU No. 32 tahun 2004. Dalam tata kelola pemerintah anggaran memiliki peranan yang cukup vital, sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (Halim dan Kusufi, 2012).

Stigma negatif dari pengelolaan pelayanan publik seperti inefisiensi anggaran, sumber kebocoran, pemborosan anggaran, institusi yang selalu defisit tidak terjadi dalam kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan dalam mengelola APBD yang baik ini menjadi faktor kunci atas keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya. Dimana pemerintah Kota Surabaya memperhatikan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggarannya sebagaimana diatur oleh UU No. 14 Tahun 2008 dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Sehingga semua laporan alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya dapat diakses secara umum. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat agar penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang tercermin dalam APBD dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Selain itu dukungan dari faktor teknologi juga mendorong keberhasilan pengelolaan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya sudah menerapkan system *e-government*, yaitu merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri (Chamid, 2013; Nur, 2014). Keberhasilan penerapan *e-government* ini perlu diapresiasi dalam sistem pemerintah karena akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan kinerja instansi (Baker, 2008). Menurut Gunawan, (2016; Widjaja dan Pratama, (2008), keberadaan *e-government*, menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya dapat berinovasi pada system keuangannya dengan menerapkan system *e-budgeting* sehingga memudahkan kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran.

Menelaah kinerja pemerintahan pemerintah kota surabaya

Kinerja dalam hal ini merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah sebagai entitas yang terwujud atas pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuannya. Karena pada hakekatnya setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat diukur dan dievaluasi. Hal yang perlu diperhatikan

dalam konteks ini adalah etos kerja dari Pemerintah Kota Surabaya. Terlebih lagi terdapat pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan daerahnya untuk kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Pelaksanaan kinerja pemerintah ini memiliki tujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

Melakukan komunikasi strategi secara lebih baik baik secara *bottom up* maupun *top down*;

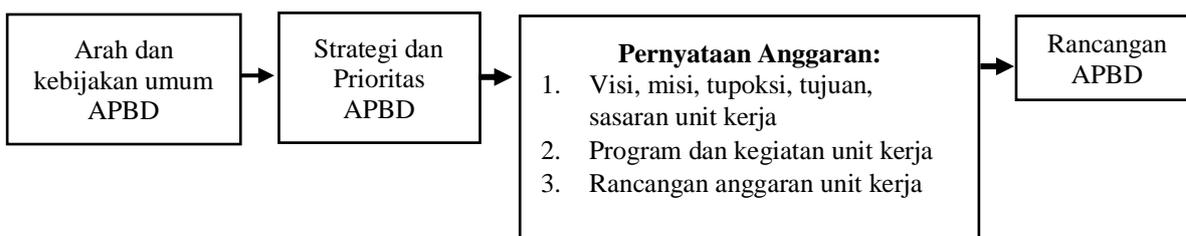
Melakukan kinerja baik dalam konteks finansial maupun non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya;

Mengakomodir pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan;

Sebagai alat yang efektif dalam mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

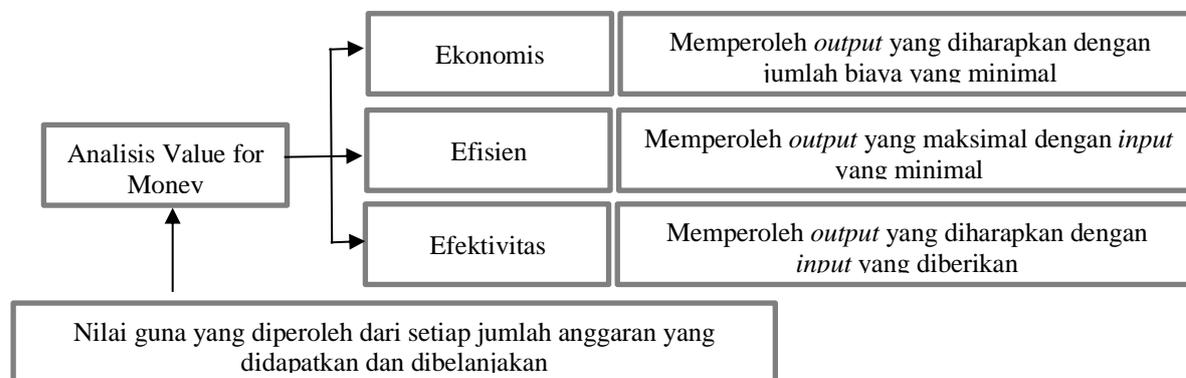
Analisis anggaran penerimaan dan belanja daerah pemerintah kota surabaya

Anggaran keuangan merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit kerja yang ada dibawahnya. Menurut (Indrayani & Khairunnisa, 2018) Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan APBD dapat dilihat dari bagan dibawah ini (Kartiwa, 2009):



Gambar 1. Proses penyusunan APBD

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran atas kinerja Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan metode *value for money*. Menurut Khalikussabir, (2007), konteks *value for money* ini tidak hanya semata berguna dalam melakukan pengukuran biaya barang dan jasa namun juga memasukkan unsur kualitas biaya, sumber daya yang digunakan, ketetapan penggunaan, batasan waktu, kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk suatu *value* atau nilai yang baik. Hal ini juga dibenarkan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2019), yang menyatakan bahwa *value for money* dalam pelaksanaan anggaran ini merupakan reuiu agar kinerja anggaran dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif yang merupakan bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah kota dan kabupaten kepada pembayar pajak, pendonor dan pemberi hibah (pada gambar 1).



Gambar 2. Value for money dalam pelaksanaan anggaran

Hal ini berarti terdapat kerangka pokok dalam menghitung value for money sebagai analisis kinerja, yaitu (Mahmudi, 2007; Mahsun, 2006; Mardiasmo, 2009): (1) komponen visi, misi, tujuan, sasaran dan target; (2) komponen input, proses, output, dan outcome, (3) komponen pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Bentuk implementasi dari konsep value for money ini, diharapkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai institusi sektor publik dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya serta sebagai pelaksanaan dari good governance. Ketika hal tersebut dapat dicapai maka ada rasa kepercayaan dari publik atas kinerja Pemerintah Kota Surabaya meningkat. Teknik perhitungan value for money yang digunakan dalam penelitian ini mengandung tiga aspek pengukuran yaitu dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dimana masing-masing elemen yang digunakan tersebut saling berhubungan, yaitu (Mardiasmo, 2009):

Pengukuran kinerja dari segi ekonomis

Dalam hal ini, pengukuran kinerja dari segi ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Pengkategorian kinerja dari segi ekonomis (lihat Tabel 1). Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, antara lain (Sari, 2014): (1) apakah pengeluaran organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?; (2) apakah pengeluaran organisasi lebih besar daripada pengeluaran organisasi lain yang sejenis sehingga dapat diperbandingkan?; (3) apakah organisasi sudah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?. Jika meninjau kinerja Pemerintah Kota Surabaya dari segi ekonomis maka apabila *input* yang lebih kecil dari pada harga *input*-nya, masuk kedalam kategori ekonomis (Andriani, 2019). Artinya dana realisasi pengeluarannya yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pengeluaran yang dialokasikan. Sehingga dengan kata lain hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah menghemat anggaran atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan atau tidak ada pemborosan, sehingga hal yang menjadi pokok perhatian dalam konteks ini adalah prioritas anggaran

Pengukuran kinerja dari segi efisiensi

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan memperbandingkan antara pengeluaran (*output*) dan masukan (*input*). Indikator efisien dalam hal ini ketika semakin besar *output*nya terhadap *input* yang digunakan. Pengkategorian kinerja dari segi efisiensi (lihat Tabel 2). Jika meninjau kinerja Pemerintah Kota Surabaya dari segi efisiensi maka apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan *input* yang digunakan dimasukkan dalam kategori efisien (Andriani, 2019). Artinya anggaran pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Surabaya lebih besar dibandingkan dengan realisasi pengeluarannya. Sehingga hal yang menjadi fokus bagi Pemerintah Kota Surabaya menghasilkan suatu produk atau hasil kerja tertentu yang dicapai dengan menggunakan sumber daya atau dana yang minimal.

Pengukuran kinerja dari segi efektivitas

Efektivitas dalam pengukuran kinerja untuk menentukan berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Pengkategorian kinerja dari segi efektivitas (lihat Tabel 3). Jika meninjau kinerja Pemerintah Kota Surabaya dari segi efektivitas maka apabila *output*-nya lebih besar dari pada tingkat *outcome*-nya masuk dalam kategori efektif (Andriani, 2019). Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini lebih besar dibandingkan dengan anggarannya pendapatannya. Sehingga hasil yang dicapai yang diprosikan oleh realisasi pendapatan nilainya melebihi dari tujuan atau target yang ditetapkan yang diprosikan oleh alokasi pendapatannya.

SIMPULAN

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian ini, maka penulis melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya menggunakan analisis *value for money*. Hal yang menjadi fokus perhatian ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan anggaran. Dimana secara keseluruhan perhitungan ketiga komponen menunjukkan hasil yang baik. Selama rentang periode penelitian rasio ekonomi menunjukkan hasil yang konsisten dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya

berhasil melakukan penghematan anggaran dengan kata lain mampu menentukan prioritas anggaran sehingga dapat meminimalisir biaya yang tidak diperlukan. Untuk rasio efisiensinya menunjukkan hasil yang sangat efisien selama rentang periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berhasil menghasilkan kinerja yang dicapai dengan menggunakan sumber dana yang serendah-rendahnya, ini dibuktikan dengan perbandingan antara anggaran pendaatan yang diperoleh dengan besarnya realisasi pengeluaran. Sedangkan untuk rasio efektivitasnya, cenderung mengalami fluktuatif dalam rentang efektif hingga sangat efektif. Untuk efektivitas anggaran ini tercermin dari tingkat realisasi pendapatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi pendapatannya.

Walaupun dari ketiga indikator kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan analisis *value for money* ini menunjukkan kinerja yang relatif baik namun masih belum sempurna. Hal yang dapat ditekankan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah menetapkan pos-pos potensial dari pendapatan daerahnya terutama pendapatan asli daerah sehingga kedepannya rasio pendapatan dan belanja dari Pemerintah Kota Surabaya tidak mengalami defisit anggaran. Sehingga diharapkan dengan membaiknya rasio kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya ini mampu meningkatkan indeks perhitungan kinerja keuangannya melalui perhitungan *value for money* terutama dalam ketiga aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2019). Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Akuntansi El-Muhasaba*, 3(1), 1–22.
- Baker. (2008). Secretary of State for Communities and Local Government. *Thomson Reuters Practical Law*, 75(141), 1–20.
- Chamid, N. (2013). Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternatif Sistem Keuangan Global. *Jurnal Al-Adl*, 6(2), 110–127.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2019). *Implementasi Value For Money melalui Peningkatan Pelaksanaan Anggaran*. 4(1).
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara.
- Kartiwa, H. A. (2009). *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum*.
- Khalikussabir. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga dan PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *E-Jurnal Riset Manajemen*, 6(3), 446–481.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(1), 1–25.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Penilaian Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. BPFE UGM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.

- Nur, E. (2014). Penerapan E-Government Publik pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan di Kota Palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 265–280.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200.
- Putra, I. K. D. A. W., & Putu, N. G. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja dengan Nilai Perusahaan. *Ejurnal Akuntansi*, 5(3), 639–651.
- Sari, N. C. F. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(1), 1–25.
- Susetyo, D. (2008). Kinerja APBD Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 39-53.
- Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat.